



2017-2018

Indikator  
Kesejahteraan  
Rakyat

*Kota Surakarta*

*Badan Pusat Statistik*  
Kota Surakarta



# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SURAKARTA 2017 – 2018**

ISBN : 978-602-71194-9-9  
Katalog BPS : 4102004.3372  
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm  
No. Publikasi : 33720.1924  
Jumlah Halaman : xiv + 85 halaman

Naskah :  
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting :  
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Grafik Kulit :  
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh :  
© Badan Pusat Statistik Kota Surakarta

Dicetak Oleh :  
CV Berguna

Sumber ikon dan template infografis : *freepik.com, canva.com, pngdownload.id, iconicon.com*

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

# TIM PENYUSUN

**Penanggung jawab:**

Totok Tavirijanto, S.Si.

**Penyunting:**

Ir. Bambang Nugraha, M.Si

**Penulis:**

Chomariah Fitriani, S.ST, M.Si

Wahyu Pamungkas Jati, S.ST

**Pengolah data:**

BPS RI

**Pembuat Infografis:**

Chomariah Fitriani, S.ST, M.Si

<https://surakartakota.bps.go.id>

**Sengaja dikosongkan**

<https://surakartakota.bps.go.id>





# KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Surakarta Tahun 2017-2018 menyajikan Infografis tentang taraf kesejahteraan rakyat, perkembangannya antar waktu dan perbandingannya antar Kecamatan dan daerah tempat tinggal. Istilah kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas yang tidak semuanya dapat diukur.

Publikasi ini hanya mencakup pada aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Informasi umum tentang kesejahteraan yang tercakup dalam publikasi ini antara lain meliputi bidang kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan pengeluaran/konsumsi penduduk. Sumber data pokok yang digunakan adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017-2018 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017 dan Agustus 2018.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan bagi terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih, semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan mampu memenuhi kebutuhan data statistik baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, akademisi maupun masyarakat luas.

Surakarta, Desember 2019  
Badan Pusat Statistik Kota Surakarta  
Kepala,

Totok Tavirijanto, S.Si  
NIP. 19650419 198802 1 001

**Sengaja dikosongkan**

<https://surakartakop.bps.go.id>



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GRAFIK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KONSEP DAN DEFINISI.....	5
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.....	15
BAB IV KESEHATAN .....	27
BAB V PENDIDIKAN .....	33
BAB VI PERUMAHAN .....	39
BAB VII KETENAGAKERJAAN .....	47
BAB VIII PENGELUARAN DAN KONSUMSI PENDUDUK.....	55
BAB IX LAIN-LAIN .....	59
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	66

**Sengaja dikosongkan**

<https://surakartakota.nps.go.id>



## DAFTAR TABEL

Tabel Lampiran 1 Proyeksi Penduduk Kota Surakarta menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2018 .....	64
Tabel Lampiran 2 Proyeksi Penduduk Kota Surakarta menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2018 .....	65
Tabel Lampiran 3 Jumlah Penduduk Kota Surakarta menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan, 2017-2018 .....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 4 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 5 Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Status Perkawinan di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 6 Persentase Penduduk Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Rata-rata Umur Perkawinan Pertama (Tahun) di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 7 Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Status KB di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 8 Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran menurut Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 9 Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 10 Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 11 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karakteristik di Kota Surakarta, 2017 – 2018 .....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 12 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Karakteristik di Kota Surakarta, 2017 – 2018 .....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 13 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Karakteristik di Kota Surakarta, 2017 – 2018.....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 14 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca Menulis dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 15 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2017-2018.....	<b>Error! Bookm</b>



Tabel Lampiran 16 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2017-2018.....	
Tabel Lampiran 17 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2017-2018.....	
Tabel Lampiran 18 Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2017-2018. ....	
Tabel Lampiran 19 Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2017-2018. ....	
Tabel Lampiran 20 Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kota Surakarta, 2016-2018 .....	
Tabel Lampiran 21 Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Jenis Kelamin KRT di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	
Tabel Lampiran 22 Persentase Rumah Tangga* menurut Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga dan Jenis Kelamin KRT di Kota Surakarta, 2017-2018.....	
Tabel Lampiran 23 Persentase Rumah Tangga* menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Jenis Kelamin KRT di Kota Surakarta, 2017-2018.....	
Tabel Lampiran 24 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih dan Sumber Air Minum Layak di Kota Surakarta, 2017-2018.....	
Tabel Lampiran 25 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Memasak/ Mandi/Cuci/dll dan Jenis Kelamin KRT di Kota Surakarta, 2017-2018.....	
Tabel Lampiran 26 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik menurut Sumber Utama Penerangan dan Jenis Kelamin KRT di Kota Surakarta, 2017-2018. ....	
Tabel Lampiran 27 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Surakarta, 2017-2018. ....	
Tabel Lampiran 28 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Golongan Umur di Kota Surakarta, 2017-2018.....	
Tabel Lampiran 29 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Surakarta, 2017-2018.....	
Tabel Lampiran 30 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Golongan umur di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	
Tabel Lampiran 31 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	

**Error! Bookm**



Tabel Lampiran 32 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Surakarta, 2017-2018.....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 33 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Surakarta, 2017-2018.....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 34 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 35 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka menurut Kategori di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 36 Rata-rata Konsumsi Kalori Perkapita dan Rata-rata Konsumsi Protein Perkapita sehari di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 37 Persentase Pengeluaran Per Kapita Per Bulan menurut Jenis Pengeluaran di Kota Surakarta, 2017-2018 ..	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 38 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Penggunaan Teknologi Informasi dan Jenis Kelamin KRT di Kota Surakarta, 2017-2018.....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 39 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima di Kota Surakarta, 2017-2018.....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 40 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Jaminan Sosial di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	<b>Error! Bookm</b>
Tabel Lampiran 41 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Aset di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	<b>Error! Bookm</b>



<https://surakartakota.bps.go.id>

**Sengaja dikosongkan**





## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Surakarta, 2010-2018 .....	16
Grafik 2. Jumlah Penduduk Kota Surakarta menurut Kecamatan, 2018 .....	16
Grafik 3. Kepadatan Penduduk Kota Surakarta menurut Kecamatan (dalam jiwa/km <sup>2</sup> ) , 2018 .....	17
Grafik 4. Rasio Jenis Kelamin Kota Surakarta, 2010-2018.....	18
Grafik 5. Struktur Umur Penduduk Kota Surakarta, 2018.....	19
Grafik 6. Persentase Penduduk Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Rata-rata Umur Perkawinan Pertama (Tahun) di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	20
Grafik 7. Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Status KB di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	21
Grafik 8. Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Surakarta, 2017-2018.....	23
Grafik 9. Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	28
Grafik 10. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2017-2018 .....	29
Grafik 11. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca Menulis dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2018 .....	34
Grafik 12. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2018 .....	34
Grafik 13. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta, .....	35
Grafik 14. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kota Surakarta, 2016 -2018 .....	40
Grafik 15. Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Jenis Kelamin KRT di Kota Surakarta, 2017 -2018 .....	41
Grafik 16. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih dan Sumber Air Minum Layak di Kota Surakarta, 2017 -2018 .....	43
Grafik 17. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Memasak/ Mandi/Cuci/dll dan Jenis Kelamin KRT di Kota Surakarta, 2017 -2018 .....	44



Grafik 18.	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu di Kota Surakarta, 2017 - 2018 .....	47
Grafik 19.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Golongan Umur di Kota Surakarta, 2017 -2018 .....	48
Grafik 20.	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Surakarta, 2018 .....	49
Grafik 21.	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Surakarta (dalam Ribu Orang), 2018 ....	50
Grafik 22.	Persentase Pengeluaran Per Kapita Per Bulan menurut Jenis Pengeluaran di Kota Surakarta , 2017-2018 .....	56
Grafik 23.	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima di Kota Surakarta , 2017-2018 .....	60
Grafik 24.	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Aset di Kota Surakarta , 2017-2018 .....	62

# PENDAHULUAN



**Kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)*.**



**Indikator kesejahteraan dalam publikasi didapatkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).**



**Kuesioner yang digunakan adalah VSEN17.K , VSEN18.K, VSEN17.KP, VSEN18.KP, SAK17.A, dan SAK18.AK.**



**Melalui penyajian data indikator kesejahteraan rakyat ini diharapkan gambaran mengenai perkembangan data terkait hal ini mampu dipelajari oleh berbagai pihak.**



<https://surakartakota.bps.go.id>

**Sengaja dikosongkan**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Kesejahteraan rakyat suatu wilayah merupakan hal penting yang akan dicapai pemerintah sebagai bagian dari pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Keberhasilan pemerintah dalam membangun suatu wilayah dapat dilihat salah satunya dengan kesejahteraan rakyat didalamnya. Berbagai indikator yang membentuk kesejahteraan rakyat dapat dilihat mulai dari kondisi yang berkaitan dengan penduduk, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, pengeluaran penduduk, dan konsumsi penduduk.

Pengukuran kesejahteraan rakyat melalui indikator-indikator yang telah disebutkan sebelumnya dapat dilihat menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan BPS setiap tahun. Dari kedua Survei tersebut didapatkan data-data yang membangun komponen kesejahteraan rakyat dari hasil pendataan dan wawancara dengan responden yang menjadi sampel.

Data Susenas yang digunakan sebagai data dalam publikasi ini merupakan hasil pendataan yang dilakukan pada bulan Maret 2017 dan 2018, sementara Sakernas dilakukan pada bulan Agustus 2017 dan 2018. Pendataan-pendataan tersebut mampu mengestimasi data sampai dengan level kabupaten/kota. Dari Susenas, diperoleh data mengenai karakteristik aspek sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, keluarga berencana, pengeluaran, dan konsumsi penduduk. Sementara dari Sakernas diperoleh data karakteristik seputar ketenagakerjaan.

Susenas diselenggarakan untuk pengumpulan data dengan kuesioner Kor (VSEN17.K dan VSEN18.K) dan data konsumsi/pengeluaran rumah tangga dengan kuesioner konsumsi dan



pengeluaran (VSEN17.KP dan VSEN18.KP). sementara untuk Sakernas diselenggarakan dengan kuesioner SAK17.AK dan SAK18.AK.

Melalui penyajian data indikator kesejahteraan rakyat ini diharapkan Grafikan mengenai perkembangan data terkait hal ini mampu dipelajari oleh berbagai pihak. Selain untuk pengetahuan masyarakat mengenai ketersediaan indikator-indikator tersebut dapat pula digunakan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk merumuskan program-program terkait yang mampu memajukan kesejahteraan rakyat di wilayah Kota Surakarta.

<https://surakartakota.bps.go.id>

The top of the page features a yellow background with blue-outlined illustrations. On the left, there are three stacked books. On the right, there are three writing instruments: a pencil, a pen, and a marker.

# KONSEP DAN DEFINISI

## MEMUAT TENTANG PENGERTIAN DARI ISTILAH- ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM PUBLIKASI INI

Istilah yang digunakan menyangkut tentang kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, pengeluaran dan konsumsi penduduk, alat komunikasi, internet, dan aset rumah tangga.



<https://sul.kartakota.bps.go.id>

**Sengaja dikosongkan**



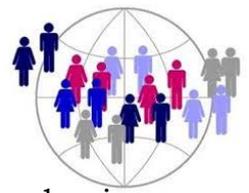
## BAB II

# KONSEP DAN DEFINISI

1. **Penduduk** adalah semua orang yang telah berdomisili selama 6 bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
2. **Belum kawin** adalah status dari mereka yang pada saat pencacahan belum terikat dalam perkawinan.
3. **Kawin** adalah status dari mereka yang terikat perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup adalah yang kawin secara sah menurut hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya) dan mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.
4. **Cerai** adalah status dari mereka yang berpisah sebagai suami isteri karena bercerai baik yang masih hidup maupun yang ditinggal mati oleh suami/isterinya dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya, tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.
5. **Akta kelahiran** adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil.
6. **Nomor Induk Kependudukan (NIK)** adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
7. **Dapat membaca dan menulis** artinya dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf latin/alfabet (a-z), huruf arab/hijaiyah, atau huruf lainnya (contoh huruf jawa, kanji, dll).
8. **Angka Melek Huruf** adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis.
9. **Tidak/belum pernah bersekolah** adalah anggota rupa berumur lima tahun ke atas yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.



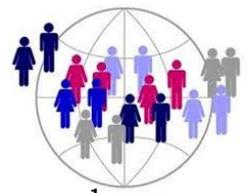
10. **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan Perguruan Tinggi.
11. **Pendidikan nonformal** adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, B, C), serta pendidikan lainnya untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
12. **Masih bersekolah** adalah anggota ruta berumur lima tahun ke atas yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C). Termasuk bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.
13. **Tidak bersekolah lagi** adalah anggota ruta berumur lima tahun ke atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.
14. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, ditandai dengan sertifikat/ ijazah.
15. **Tamat sekolah** adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan formal dan nonformal (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah.
16. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
17. **Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
18. **Angka Partisipasi Kasar (APK)** adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu.



19. **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.
20. **Menderita sakit** adalah mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya).
21. **Berobat jalan** adalah upaya anggota ruta yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah anggota ruta.
22. **Jaminan kesehatan** adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan. Menurut UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Kepemilikan bangunan adalah status penguasaan bangunan tempat tinggal atau rumah yang ditempati dilihat dari sisi anggota ruta yang mendiaminya. Terdiri dari milik sendiri, kontrak, sewa, rumah dinas, rumah bersama dan lainnya.
23. **SPAL** adalah Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) terpadu. Dalam sistem pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah ruta tidak ditampung dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair.
24. **Sumber Air Minum Bersih** adalah sumber air minum yang berasal dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 m.
25. **Sumber Air Minum Layak** adalah sumber air minum yang berasal dari leding, air hujan, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 m.
26. **Penduduk yang termasuk angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
27. **Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.



28. **Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.
29. **Penganggur Terbuka**, terdiri dari :
  - a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
  - b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
  - c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
  - d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. (lihat pada “*An ILO Manual on Concepts and Methods*”).
30. **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka :
  - a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
  - b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
  - c. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.
31. **Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang “baru”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar.
32. **TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)** adalah persentase jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.
33. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Tidak termasuk yang sedang libur sekolah.
34. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga.



Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.

35. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015.
36. **Jenis pekerjaan/jabatan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini, mengikuti Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2014 yang mengacu kepada ISCO 88.
37. **Status pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu:
  - a. **Berusaha sendiri**, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus
  - b. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar**, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap
  - c. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar**, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar
  - d. **Buruh/Karyawan/Pegawai**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/ perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu
  - e. **Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan,



peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian. Majikan adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati

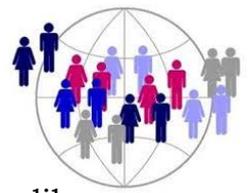
- f. **Pekerja bebas di nonpertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

Huruf e dan f yang dikembangkan mulai pada publikasi 2001, pada tahun 2000 dan sebelumnya dikategorikan pada huruf d dan a (huruf e termasuk dalam d dan huruf f termasuk dalam a).

- g. **Pekerja keluarga/tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari :

1. Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ ayahnya bekerja di sawah
2. Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung
3. Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya

38. **Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan** adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.



39. **Konsumsi kalori dan protein** dihitung dengan mengalikan kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan nilai kandungan kalori dan protein setiap jenis makanan berdasarkan daftar konversi zat gizi.
40. **Telepon seluler (HP)** adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa ke mana-mana (portable, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Selain berfungsi sebagai telepon, telepon selular modern biasanya mendukung layanan tambahan seperti Short Messages Services (SMS), Multimedia Messages Service (MMS), e-mail dan akses Internet, aplikasi bisnis dan permainan, serta fotografi. Saat ini, Indonesia mempunyai dua sistem jaringan telepon bergerak selular yaitu Global System for Mobile Telecommunications (GSM) dan Code Division Multiple Access (CDMA).
41. **Komputer** mengacu pada komputer desktop, laptop (portable) atau tablet (atau komputer genggam yang serupa).
  - a. **Personal Computer (PC)/Desktop** adalah komputer yang biasanya tetap di satu tempat, biasanya pengguna ditempatkan di depannya, di belakang keyboard.
  - b. **Laptop (Portable)** adalah komputer yang cukup kecil untuk dibawa dan biasanya memungkinkan tugas yang sama sebagai komputer desktop, tetapi juga mencakup notebook dan netbook tetapi tidak termasuk tablet dan sejenisnya komputer genggam.
  - c. **Tablet (atau sejenisnya komputer genggam)** adalah komputer yang terintegrasi ke layar sentuh datar, yang dioperasikan dengan menyentuh layar daripada menggunakan keyboard fisik. Dalam hal ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi, seperti set TV pintar dan perangkat dengan telepon sebagai fungsi utama mereka, seperti smartphone. Tablet meskipun bisa digunakan untuk menelpon, tidak dimasukkan dalam kelompok telepon selular karena fungsi utama tablet adalah sebagai komputer.
42. **Internet** adalah sebuah jaringan komputer publik di seluruh dunia. Internet menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk world wide web dan membawa e-mail, berita, hiburan, dan file data.
43. **Beras untuk rakyat miskin (raskin)** adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin berupa pendistribusian beras khusus kepada keluarga miskin yang harganya telah disubsidi oleh pemerintah.
44. **Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)** adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka



pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2013.

<https://surakartakota.bps.go.id>

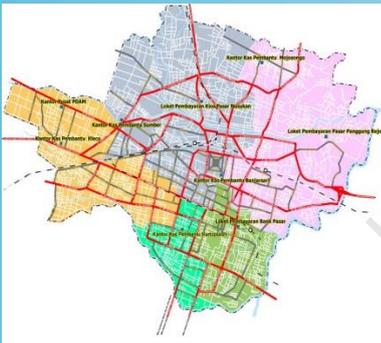
# Kependudukan dan KB



*Sejak Tahun 2010, Penduduk Kota Surakarta semakin meningkat*



*Tahun 2018, Jumlah Penduduk Kota Surakarta sebanyak 518.170 jiwa*



*Penduduk paling banyak di Kecamatan Banjarsari dibanding kecamatan lain*



**Hampir separuh wanita pernah kawin usia 15-49 tahun memakai KB**





<https://surakartakota.bps.go.id>

**Sengaja dikosongkan**



## **BAB III**

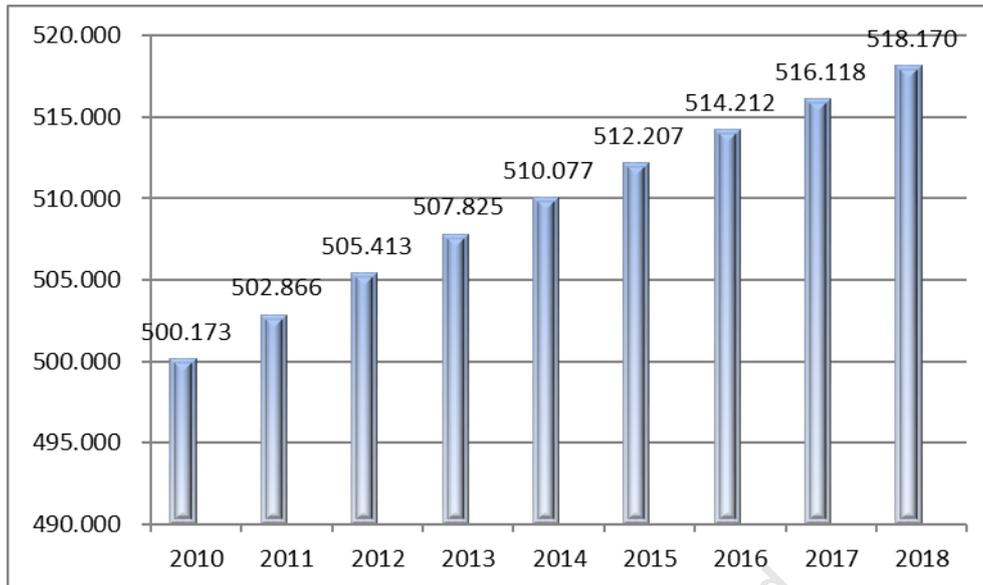
# **KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Penduduk adalah subjek vital suatu bangsa. Peran penduduk dalam memberikan kontribusi untuk kemajuan suatu bangsa diperlukan sebagai bagian dari usaha tercapainya target dari pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, ketersediaan data mengenai kependudukan sangat penting dimiliki oleh pemerintahan suatu wilayah demi terwujudnya berbagai tujuan untuk pembangunan wilayah tersebut.

Dari data penduduk mengenai jumlah penduduk menurut kelompok umur, menurut kecamatan, maupun menurut jenis kelamin, pemerintah mampu membuat perencanaan yang tepat bagi wilayah tersebut sehingga program-program yang akan direalisasikan berjalan secara efektif dan efisien. Dari data-data tersebut dapat pula diketahui piramida penduduk suatu wilayah, rasio usia produktif terhadap penduduk non produktif di wilayah tersebut mampu mengGrafikkan angka beban ketergantungan suatu wilayah.

Jumlah penduduk perempuan masih lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki yang ditunjukkan dengan angka rasio jenis kelamin tahun 2018 sebesar 95 persen. Kondisi ini juga berlangsung di seluruh kecamatan di Kota Surakarta. Rasio jenis kelamin dari semua kecamatan angkanya berada diantara 93 sampai 97 persen.

Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk Kota Surakarta terus mengalami kenaikan. Di tahun 2016 lalu, proyeksi penduduk Kota Surakarta sekitar 514 ribu. Tahun 2017 naik sekitar 0,37 persen yang diproyeksi berjumlah 516 ribu. Begitu pula tahun 2018, jumlah penduduk Kota Surakarta juga mengalami rasio kenaikan yang sama yaitu sekitar 0,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya.



**Grafik 1. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Surakarta, 2010-2018.**

Dari hasil publikasi Penduduk Kota Surakarta Hasil Proyeksi 2010-2020 oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Surakarta tahun 2018 dalam kisaran 518 ribu. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Banjarsari merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya yaitu sekitar 163 ribu dan Kecamatan Serengan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sekitar 45 ribu.



**Grafik 2 . Jumlah Penduduk Kota Surakarta menurut Kecamatan, 2018**

Banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Kota Surakarta tidak lepas dari peranan banyaknya fasilitas umum dan faktor yang sangat



dekat dengan pusat pemerintahan dan niaga perkotaan. Kepadatan penduduk kecamatan Pasar Kliwon merupakan yang tertinggi dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Surakarta dengan angka kepadatan mencapai 15.997 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2018. Kecamatan Serengan mempunyai kepadatan penduduk terbesar kedua setelah Kecamatan Pasar Kliwon di Kota Surakarta yang mencapai angka 14.175 jiwa/km<sup>2</sup>. Angka kepadatan yang paling kecil disandang oleh Kecamatan Laweyan sebesar 10.332 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara total angka kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2018 adalah sebesar 11.759 jiwa/km<sup>2</sup>.

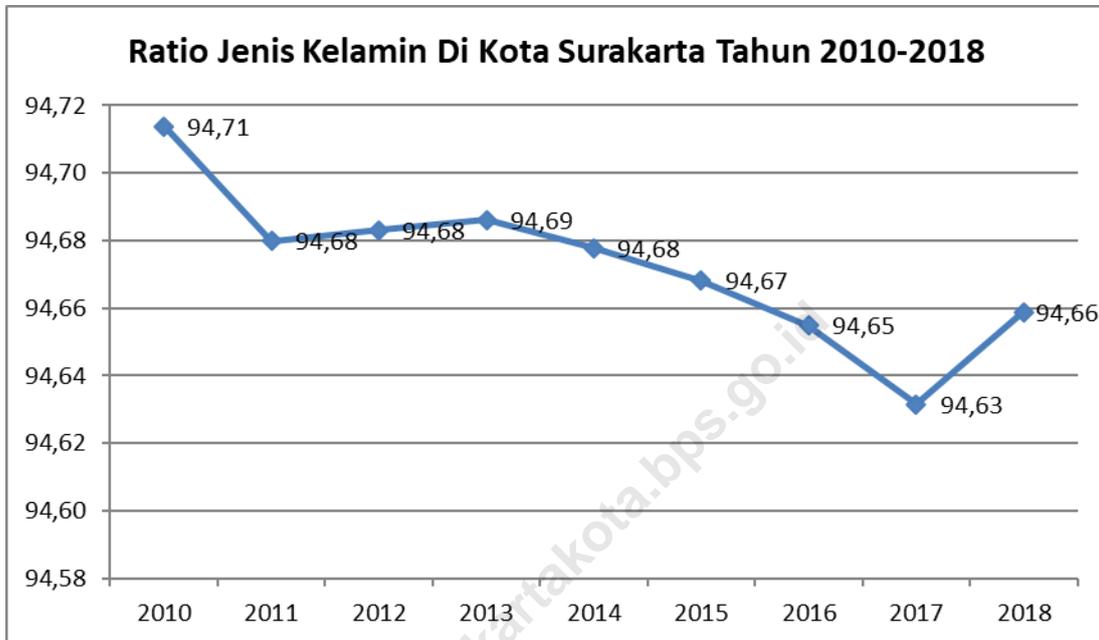


**Grafik 3. Kepadatan Penduduk Kota Surakarta menurut Kecamatan (dalam jiwa/km<sup>2</sup>) , 2018**

Pada bagian awal telah disebutkan bahwa secara umum, jumlah penduduk perempuan di Kota Surakarta lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Angka rasio jenis kelamin pada tahun 2018 sebesar 95 menunjukkan bahwa dari 100 penduduk yang berjenis kelamin perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki. Angka ini tidak hanya dipengaruhi oleh kelahiran penduduk namun juga dapat dipengaruhi oleh pola migrasi dan kematian penduduk laki-laki dan perempuan.



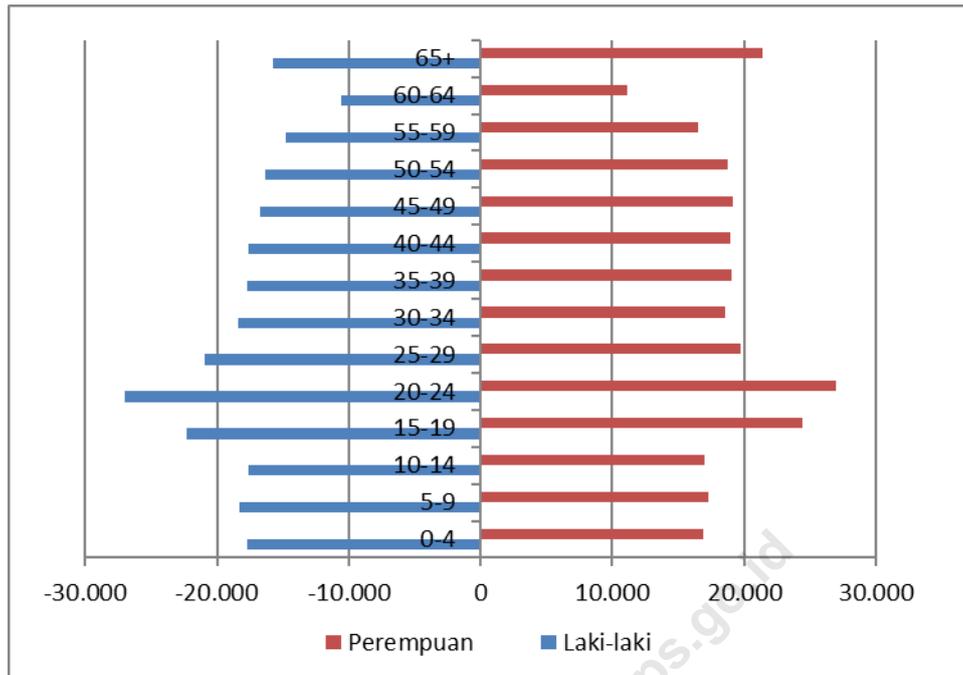
Meskipun demikian, ternyata penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki mulai dari kelompok umur 25 tahun keatas. Sedangkan penduduk pada kelompok umur 0-24 tahun jumlah penduduk laki-laki masih berada diatas penduduk perempuan.



**Grafik 4. Rasio Jenis Kelamin Kota Surakarta, 2010-2018**

Distribusi penduduk menurut usia juga mampu mengGrafikkan angka beban ketergantungan di suatu wilayah. Melalui struktur umur penduduk dapat dilihat apakah penduduk pada wilayah tersebut penduduk usia produktifnya lebih besar daripada penduduk usia tidak produktif atau sebaliknya. Berdasarkan hasil proyeksi, Kota Surakarta memiliki sekitar 65 persen penduduk usia produktif dibandingkan dengan total penduduk di tahun 2018.

Rasio ketergantungan Kota Surakarta pada tahun 2017 sebesar 27,41 sementara di tahun 2018 tidak berbeda jauh yaitu dalam kisaran 27,00. Artinya, di tahun 2018 setiap 100 penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) menanggung sekitar 27 penduduk usia tidak produksi yang terdiri dari anak-anak (usia 0-14 tahun) dan lansia (usia 65 tahun ke atas). Distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada keterangan Grafik dibawah ini.



**Grafik 5. Struktur Umur Penduduk Kota Surakarta, 2018**

Distribusi penduduk suatu wilayah tidak lepas dari angka kelahiran. Banyaknya bayi yang lahir juga erat kaitannya dengan usia kawin pertama wanita yang melahirkannya. Usia perkawinan pertama menunjukkan dimulainya masa reproduksi seorang wanita. Semakin muda usia seorang wanita melangsungkan perkawinan pertama, maka akan semakin panjang masa reproduktifnya. Semakin panjang masa reproduktif seorang wanita, maka kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Antara tahun 2017 dan 2018, penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berstatus kawin mengalami peningkatan. Begitu halnya dengan penduduk yang melakukan perceraian. Pada tahun 2018, di Kota Surakarta jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang bercerai mencapai



angka 10,84 persen, naik 1 poin dari tahun 2017 yang tercatat dalam kisaran 9 persen. Fenomena kenaikan perkawinan dan perceraian ini juga terjadi pada penduduk dengan kelompok umur 15 sampai dengan 45 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas pada tahun 2017 di Kota Surakarta hampir 50 persen penduduk wanita paling banyak melakukan perkawinan pertama pada umur 15-49 tahun. Wanita yang melakukan perkawinan pertama pada usia kurang dari 17 tahun jumlahnya sekitar 9 persen dan persentase ini meningkat pada tahun 2018 yang mencapai angka 12 persen. Hal ini kurang sejalan dengan program pemerintah melalui BKKBN yang mencanangkan usia perkawinan pertama antara 21 sampai dengan 25 tahun.



**Grafik 6. Persentase Penduduk Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Rata-rata Umur Perkawinan Pertama (Tahun) di Kota Surakarta, 2017-2018**

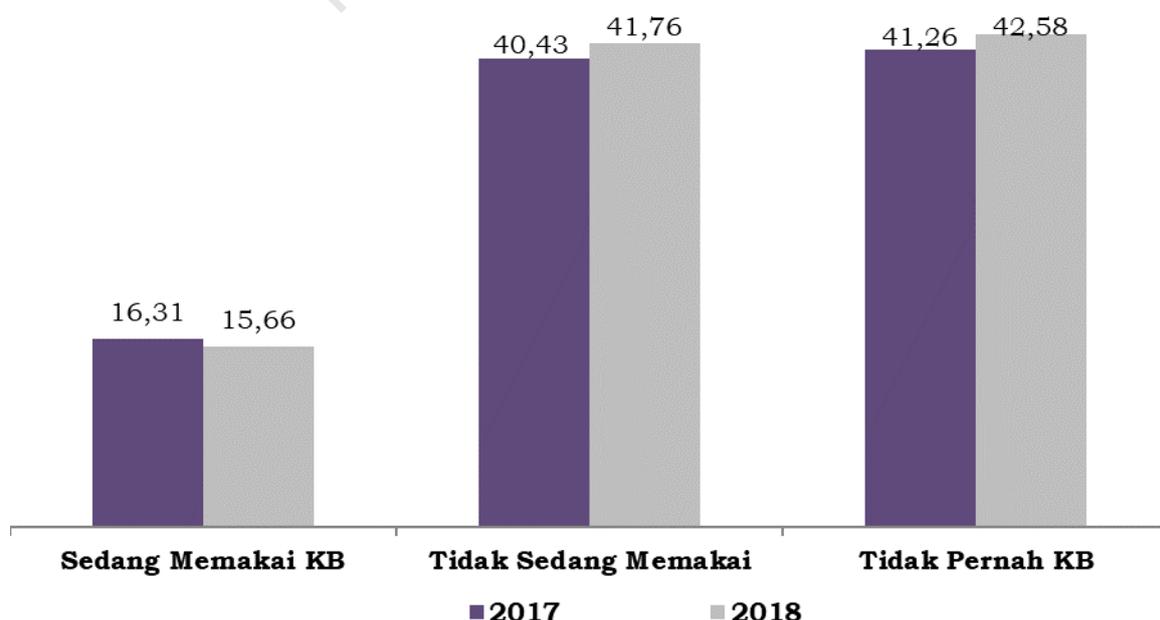
Namun demikian, kesadaran masyarakat khususnya wanita untuk melakukan perkawinan pertama di usia cukup telah menunjukkan angka yang perlu diapresiasi. Selama kurun waktu 2017, wanita yang melakukan perkawinan pertama di usia 19 tahun ke atas telah mencapai kisaran 90 persen. Meskipun angkanya sempat menurun sekitar 3 poin pada kisaran 87 persen di 2018, namun hal ini mampu menggambarkan bahwa sebagian besar wanita di Kota Surakarta menyadari bahwa dalam membentuk rumah tangga baru di perkawinan pertama mereka



memerlukan kesiapan yang matang khususnya dari segi kecukupan umur.

Berbagai program pemerintah dalam mengatur jumlah kelahiran penduduk tidak hanya seputar sosialisasi mengenai umur ideal melakukan perkawinan pertama. Hal lain yang cukup gencar dilakukan adalah dengan menggalakkan program Keluarga Berencana (KB). Cara ini dirasa cukup efektif dalam melakukan pengendalian kelahiran penduduk. Program ini mulai dicanangkan dan direalisasikan pada tahun 1970-an. Namun pada saat itu, partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB masih tergolong rendah. Pada tahun 2018, hamper separuh wanita usia subur menggunakan KB sebagai langkah preventif mencegah kehamilan.

Pada tahun 2017, besarnya wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin dan sedang menggunakan KB mencapai 16 persen. Angka ini mengalami penurunan di tahun 2018 yang hanya mencatat sekitar 15 persen. Penurunan ini dibarengi dengan kenaikan jumlah wanita usia tersebut yang tidak pernah menggunakan KB. Dari tahun 2017 ke tahun 2018 wanita berstatus kawin dalam rentang umur tersebut yang tidak pernah menggunakan KB naik sekitar 1 persen dari 41 persen ke 42 persen.



**Grafik 7. Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Status KB di Kota Surakarta, 2017-2018**



Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan (Disdukcapil). Akta Kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting dan merupakan program pemerintah yang harus didukung dengan tertibnya laporan dari masyarakat. Dokumen ini pun akan sangat berguna di berbagai bidang seperti dalam hal pencarian kerja, sekolah, ataupun mengurus dokumen kependudukan yang lain.

Pada tahun 2017, secara total di Kota Surakarta sebanyak 97 persen penduduknya yang berumur 0-17 tahun sudah memiliki Akta Kelahiran. Angka ini mengalami kenaikan di tahun 2018 sebanyak 1 persen. Jika dirinci menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan lebih banyak memiliki Akta Kelahiran dibandingkan penduduk laki-laki.

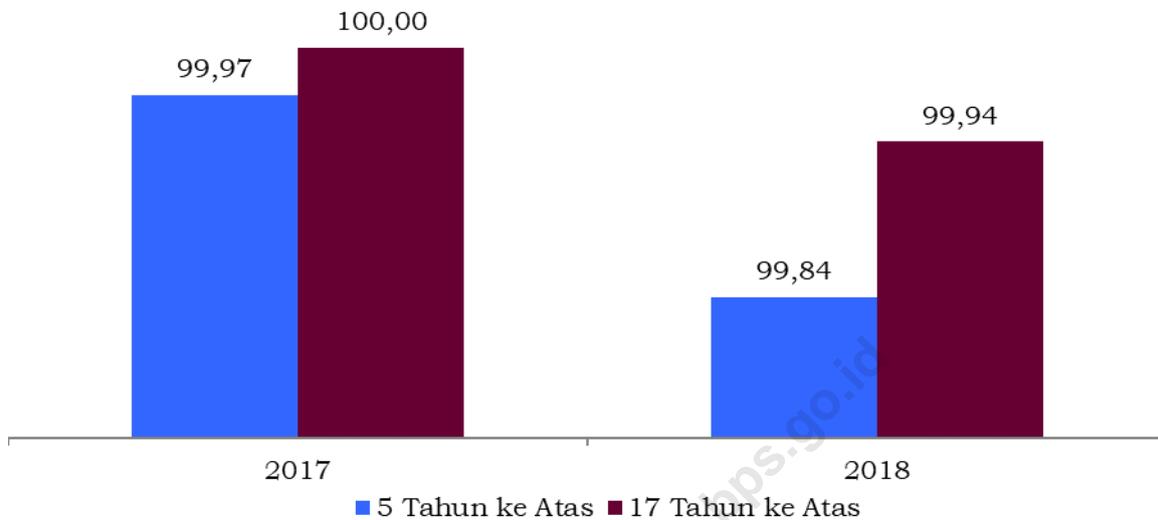
Sejalan dengan kepemilikan Akta Kelahiran, kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga merupakan indikator tertibnya administrasi pencatatan kependudukan. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi.

NIK terdiri dari 16 digit. Kode penyusun NIK terdiri dari 2 digit awal merupakan kode provinsi, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit sesudahnya kode kecamatan, 6 digit selanjutnya merupakan tanggal lahir dalam format hhhbtt (untuk wanita tanggal ditambah 40), lalu 4 digit terakhir merupakan nomor urut yang dimulai dari 0001. NIK biasanya tercantum pada dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

Pada tahun 2017, penduduk Kota Surakarta yang berusia 5 tahun ke atas yang telah memiliki NIK sebesar 99,97 persen. Bahkan penduduk



yang berusia 17 tahun ke atas seluruhnya telah memiliki NIK. Namun di tahun 2018, penduduk yang berusia 17 tahun ke atas di Kota Surakarta belum seluruhnya memiliki NIK.



**Grafik 8. Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Surakarta, 2017-2018**



<https://sul.kartakota.bps.go.id>

**Sengaja dikosongkan**

# Kesehatan

## Angka Kesakitan

Dari 100 orang penduduk,  
16 diantaranya sakit  
dan terganggu aktivitasnya

16,64



## Pengguna Jaminan Kesehatan

Penduduk yang menggunakan  
jaminan kesehatan saat berobat  
jalan sekitar : 69 persen

69,15

## Melahirkan di Faskes

Sebagian besar melahirkan  
di Fasilitas Kesehatan



## Melahirkan dengan Nakes

Perempuan yang melahirkan  
ditolong Tenaga Kesehatan  
sekitar 99 persen

99







**Sengaja dikosongkan**

<https://surakartakota.bps.go.id>



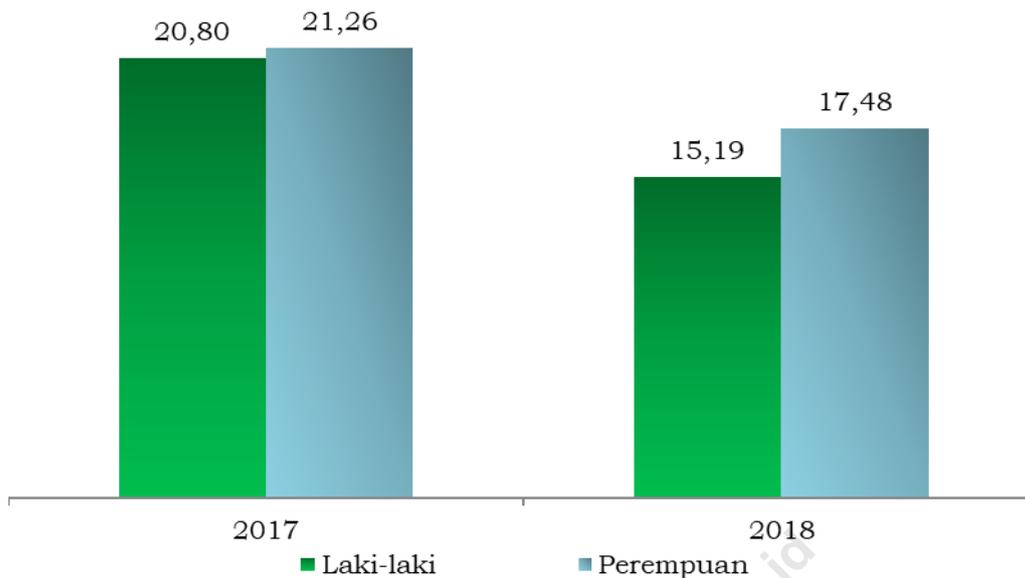
## **BAB IV**

# **KESEHATAN**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan bagi semua orang. Bahkan tokoh dunia pernah menyampaikan bahwa harta sejati bukanlah emas dan perak, tapi kesehatan. Pentingnya mencapai tujuan demi memperoleh kesehatan baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar merupakan salah satu upaya dalam mendukung pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional di bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Salah satu indikator yang bisa menggambarkan tingkat kesehatan di suatu wilayah adalah dengan Angka Kesakitan. Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu dalam aktivitas sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya). Di tahun 2017, angka kesakitan di Kota Surakarta berada dalam kisaran angka 21. Angka ini menurun di tahun 2018 menjadi 16, artinya dari 100 penduduk di Kota Surakarta terdapat 16 orang yang sakit dan merasa terganggu aktivitas sehari-harinya.

Yang cukup menarik adalah, angka kesakitan pada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan baik di tahun 2017 maupun 2018. Hanya saja, di tahun 2017 perbedaan tersebut tidak terlalu jauh. Dari 100 penduduk Kota Surakarta di tahun 2018 sebanyak 15 penduduk berjenis kelamin laki-laki sakit dan terganggu aktivitasnya sementara penduduk perempuan yang mengalami sakit dan terganggu aktivitasnya adalah sebanyak 17 orang. Pada umumnya laki-laki lebih beresiko mengalami keluhan kesehatan dibandingkan perempuan akibat rentan terkena penyakit jantung dan gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok.



**Grafik 9. Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2017-2018**

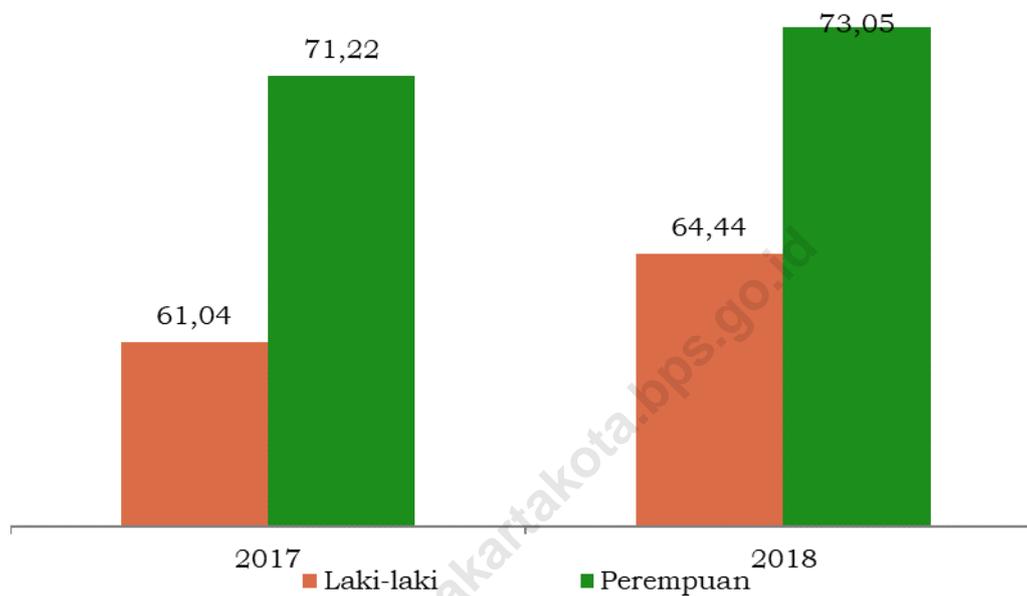
Dari seluruh penduduk di Kota Surakarta yang melakukan berobat jalan untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya menggunakan jaminan kesehatan sekitar sepertiga dari total penduduk yang berobat jalan. Di tahun 2017, sebanyak 65 persen penduduk menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan sementara sisanya tidak menggunakan jaminan kesehatan. Di tahun 2018 keanggotaan dalam jaminan kesehatan semakin banyak salah satunya ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan dibanding tahun sebelumnya sehingga mencapai 69 persen.

Penduduk perempuan lebih banyak menggunakan jaminan kesehatan ketika melakukan rawat jalan dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2017 perbedaan ini mencapai 10 persen dimana jumlah penduduk perempuan yang melakukan rawat jalan dengan jaminan kesehatan sebanyak 61 persen sementara laki-laki hanya 71 persen. Di tahun 2018 perbedaan keduanya hanya sekitar 9 persen dengan jumlah penduduk perempuan yang menggunakan jaminan kesehatan saat rawat jalan sekitar 73 persen.

Bila dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga pasien yang melakukan rawat jalan, di tahun 2018 penduduk dengan kelompok pengeluaran 40 persen di tengah merupakan pengguna



jaminan kesehatan terbanyak dibanding kelompok pengeluaran yang lain ketika melakukan rawat jalan. Artinya, penduduk dengan kriteria pengeluaran kelas menengah paling banyak memanfaatkan jaminan kesehatan dibanding kelompok penduduk yang lain. Justru penduduk dengan kategori kelompok pengeluaran terbawah merupakan kelompok penduduk yang paling sedikit memanfaatkan jaminan kesehatan.



**Grafik 10. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2017-2018**

Banyaknya penduduk yang mendiami suatu wilayah dipengaruhi salah satunya oleh besaran angka kelahiran penduduk di wilayah tersebut. Berhasilnya seorang bayi lahir selamat dari rahim ibu juga tidak lepas dari peranan fasilitas kesehatan yang memadai dan dapat dijangkau oleh penduduk tersebut. Berdasarkan hasil pendataan Susenas 2018, belum semua perempuan usia subur melahirkan di fasilitas kesehatan di Kota Surakarta. Di Kota Surakarta semua perempuan yang melahirkan sudah menggunakan fasilitas kesehatan. Perempuan-perempuan tersebut lebih memilih melahirkan di fasilitas kesehatan dibandingkan melahirkan di rumah sendiri. Ini mungkin saja terjadi bila jarak rumah pasien dengan fasilitas kesehatan terdekat masih cukup jauh atau karena pasien masih memiliki pemahaman yang kurang terkait pelayanan fasilitas kesehatan tersebut.



Selain pentingnya melakukan kelahiran di fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan juga mempunyai peranan penting dalam memberikan kemudahan proses yang dijalani dan keselamatan bayi yang dilahirkan. Di tahun 2018, sudah 100 persen perempuan usia subur dibantu tenaga kesehatan selama proses persalinan.

<https://surakartakota.bps.go.id>

# Pendidikan

## Angka Melek Huruf

Penduduk 15 tahun ke atas ,  
96 % sudah melek huruf



## Penduduk Usia 7-24

Paling banyak sedang Bersekolah SD/ sederajat  
Di Tahun 2018,  
Seluruh Penduduk Usia ini Sedang/ Pernah Bersekolah.



## Angka Partisipasi Murni

Tahun 2018 untuk

Setingkat SD 99,22 %  
Setingkat SMP 79,34 %  
Setingkat SMA 65,26 %



## Penduduk Usia 5 ke Atas

Paling banyak berstatus Tidak Bersekolah Lagi Baik di Tahun 2017  
Maupun Di Tahun 2018



<https://sul.kartakota.bps.go.id>

**Sengaja dikosongkan**



## **BAB V**

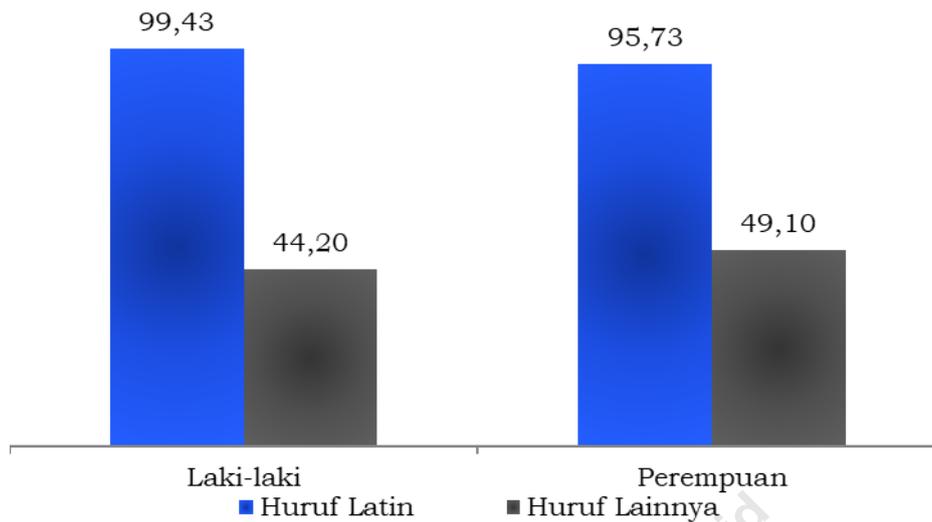
# **PENDIDIKAN**

Pendidikan merupakan fondasi penting untuk kemajuan bangsa. Tanpa pendidikan, hampir tidak mungkin menghendaki perkembangan kearah yang lebih baik. Melalui pendidikan dapat dilahirkan bibit-bibit unggulan generasi penerus bangsa untuk membawa suatu negeri menunjukkan kemampuannya pada dunia internasional. Pendidikan juga merupakan salah satu target utama dalam pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan dan ingin dicapai oleh pemerintah.

Dimensi pendidikan itu sendiri bisa dicapai melalui banyak faktor seperti pengentasan pendidikan dasar, peningkatan kemampuan membaca menulis, partisipasi pendidikan pelatihan, maupun penambahan kurikulum yang mempertimbangkan kemajuan teknologi. Dengan melihat indikator-indikator tersebut, pemerintah mampu merumuskan kebijakan apa yang masih perlu ditambah serta kebijakan apa yang sudah dilakukan dan efektif.

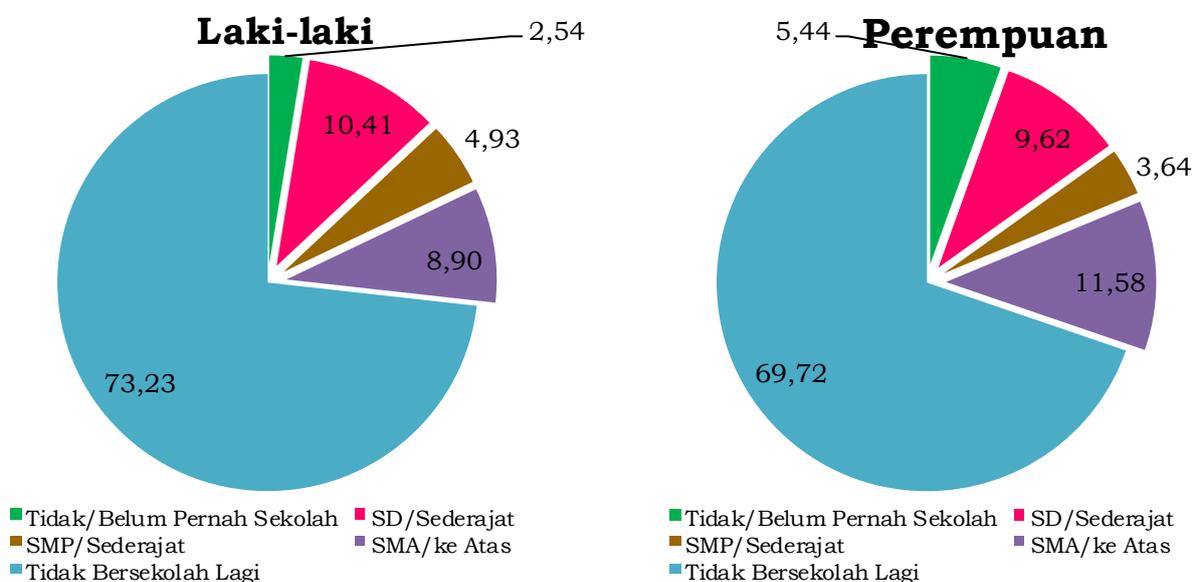
Pada tahun 2018, angka melek huruf penduduk 15 tahun ke atas di Kota Surakarta telah mencapai 98 persen. Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis. Angka melek huruf pada penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan perbedaan sekitar 3 persen. Dari 100 penduduk laki-laki berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 98 orang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Jika dirinci dari kemampuan membaca dan menulisnya, penduduk Kota Surakarta yang berusia 15 tahun ke atas lebih banyak menguasai kemampuannya pada huruf latin. Pada penduduk laki-laki, sebanyak 99 persen mampu membaca dan menulis huruf latin sementara kemampuan huruf lainnya (arab, jawa, dll) sebanyak 44 persen saja. Untuk penduduk perempuan, kemampuan pada huruf latin sebesar 95 persen sementara untuk huruf lainnya sebesar 49 persen, lebih rendah dibandingkan kemampuan pada penduduk berjenis kelamin laki-laki.



**Grafik 11. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca Menulis dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2018**

Dari tahun ke tahun, proporsi penduduk dengan status pendidikan tidak bersekolah lagi merupakan yang terbanyak dibandingkan penduduk dengan status pendidikan yang lain. Kategori penduduk ini umumnya berisikan orang yang sudah bekerja. Pada tahun 2018, penduduk usia 5 tahun ke atas yang sudah tidak bersekolah lagi di Kota Surakarta untuk laki-laki mencapai 71 persen sementara perempuan sekitar 69 persen.



**Grafik 12. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2018**



Usia sekolah dikategorikan pada usia antara 7 dan 24 tahun. Penduduk usia 7 sampai dengan 24 tahun yang tidak bersekolah lagi di Kota Surakarta pada tahun 2018 adalah sebanyak 29 persen dari total penduduk dengan rentang usia tersebut. Pada kategori usia 7-24 tahun, paling banyak merupakan penduduk yang masih berstatus sekolah SMA/ sederajat. Jumlahnya mencapai 29 persen pada tahun 2018. Di tahun 2017, masih terdapat penduduk usia 7-24 tahun yang tidak/ belum pernah sekolah. Namun di tahun 2018 kategori tersebut hampir sudah tidak ada. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mewajibkan anak usia minimal 6,5 sampai 7 tahun telah memasuki bangku sekolah dasar.



**Grafik 13. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2017-2018**

Indikator lain yang mampu menggambarkan keadaan pendidikan suatu wilayah adalah dengan melihat Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang



sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu.

Pada tahun 2017, APS untuk penduduk yang berusia 7-12 adalah sebesar 99. Ini berarti dari 100 penduduk pada kelompok umur tersebut sebanyak 99 penduduk masih bersekolah. Sementara untuk kelompok umur 13 sampai dengan 15 tahun angkanya menunjukkan besaran 98 persen dan semakin kecil untuk kelompok umur 16 sampai dengan 18 tahun yaitu sekitar 76 persen. Pada masing-masing jenjang umur terdapat penduduk yang berstatus tidak bersekolah baik belum pernah sekolah maupun sudah tidak bersekolah lagi. Pada tahun 2018, seluruh penduduk usia 7 sampai 12 tahun masih bersekolah. Sementara itu, APS penduduk usia 13-15 tahun adalah sebesar 99 persen dan jenjang umur 16-18 tahun sekitar 77 persen.

APM setingkat pendidikan SD di tahun 2017 adalah sebesar 98 persen, setingkat SMP sebesar 76 persen, dan setingkat SMA pada kisaran 65 persen. Untuk tahun 2018 juga tidak berbeda jauh dimana APM setingkat SMA masih yang paling kecil yaitu sekitar 65 persen, setingkat SMP sebesar 79 persen, dan setingkat SD sebesar 99 persen.

Di tahun 2017, APK setingkat pendidikan SD sebesar 107 persen, untuk setingkat SMP 83 persen, dan untuk setingkat SMA sebesar 80 persen. Sementara itu di tahun 2018 nilai APK yang melebihi 100 hanya pada setingkat SD yaitu sebesar 106 persen.

# PERUMAHAN



Sebagian besar rumah tangga menempati rumah milik sendiri

Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar milik sendiri lebih besar



80 % lebih rumah tangga memiliki sumber air bersih dan akses terhadap sumber air layak



**Sengaja dikosongkan**

<https://surakartakota.bps.go.id>

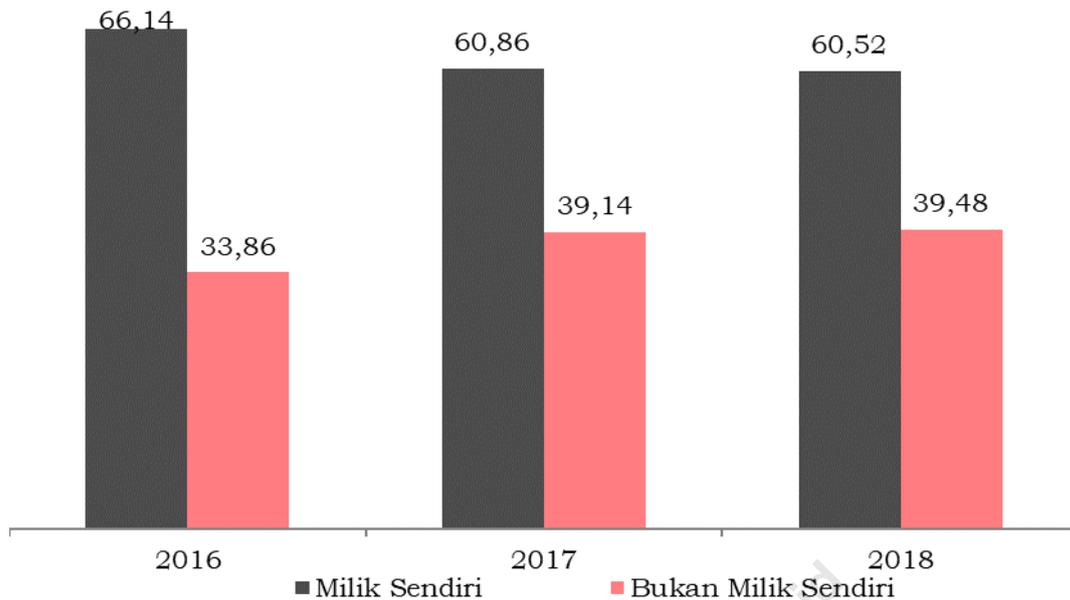


## **BAB VI**

# **PERUMAHAN**

Karakteristik perumahan merupakan kebutuhan penting bagi kelangsungan hidup manusia pada saat ini. Rumah merupakan tempat berlindung dan bisa menunjukkan kelas sosial bagi penghuninya. Rumah juga dapat berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi bagi rumah tangga seperti misalnya untuk kegiatan proses industri. Dari rumah juga dapat dilihat tingkat kesejahteraan penduduk sebagai penghuninya yang diukur dari indikator-indikator tertentu seperti jenis lantai, fasilitas pembuangan sampah dan limbah, status kepemilikan, sanitasi, maupun dari sumber penerangannya. Di era teknologi yang makin maju ini diharapkan perkembangan perumahan dan fasilitas didalamnya pada masyarakat juga semakin memadai. Sehingga dengan melihat perkembangan karakteristik perumahan di suatu wilayah, pemerintah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program terkait dengan perumahan.

Dari seluruh rumah tangga di Kota Surakarta, di tahun 2017 masih terapat sekitar 42 persen rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal yang berstatus bukan milik sendiri. Kriteria bangunan tersebut adalah bangunan yang disewa, dihibahkan namun belum atas nama rumah tangga tersebut, atau bangunan milik orang lain meskipun tanpa membayar sewa. Di tahun 2018 jumlahnya turun menjadi sekitar 39 persen. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, banyaknya rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal miliknya sendiri berada dalam kisaran 60 sampai 66 persen dari total rumah tangga. Sementara di tahun 2017 tercatat sejumlah 76 persen dari total rumah tangga di Kota Surakarta. Pada tahun 2018, jumlah rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri berkisar 60 persen.



**Grafik 14. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kota Surakarta, 2016 - 2018**

Mengulas tentang perumahan lekat kaitannya dengan fasilitas sanitasi dan pembuangan air besar yang dimiliki tiap-tiap rumah tangga. Fasilitas tempat buang air besar atau jamban yang sehat adalah tempat pembuangan akhir tinja atau kotoran manusia yang meminimalisir kontaminasi dari kotoran tersebut ke tubuh manusia. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 3 Tahun 2014, dicanangkan gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Salah satunya dengan memicu gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan. Gerakan ini diwujudkan antara lain dengan melakukan kegiatan paling sedikit terdiri dari membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan dan menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. Dengan menggunakan fasilitas pembuangan kotoran yang sehat tersebut, masyarakat membantu pemerintah dalam pencapaian tujuan kehidupan bermasyarakat yang lebih sehat.

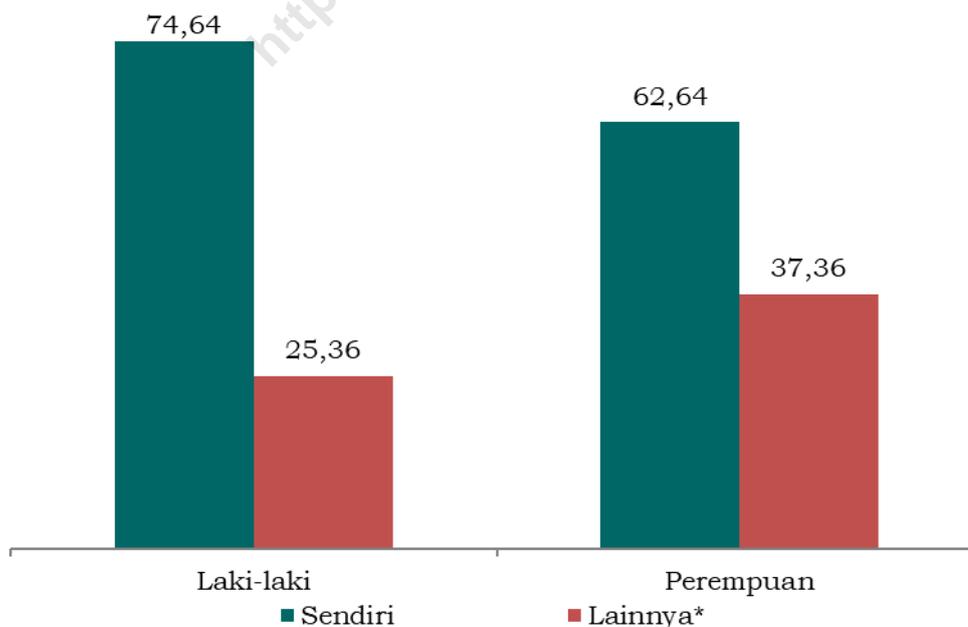
Pada tahun 2017 dan 2018, baik untuk rumah tangga dengan Kepala Rumah Tangga laki-laki maupun perempuan, sebagian besar



rumah tangga di Kota Surakarta menggunakan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri. Di tahun 2018, secara total rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar milik sendiri ada sekitar 72 persen dan sisanya menggunakan fasilitas lainnya. Hal ini menunjukkan kesadaran akan kesehatan dan kebersihan pembuangan akhir tinja di masyarakat Kota Surakarta sudah cukup tinggi.

Di tahun 2017, pada ruta dengan KRT laki-laki yang menggunakan jamban milik sendiri banyaknya sekitar 17 persen dari total ruta yang ber-KRT laki-laki. Sementara untuk ruta dengan KRT perempuan jumlahnya sekitar 31 persen yang masih menggunakan fasilitas buang air besar secara bersama, MCK Umum, atau bahkan tidak ada/tidak menggunakan jamban sebagai fasilitas buang air besar.

Di tahun 2018, ruta dengan KRT berjenis kelamin laki-laki yang menggunakan fasilitas akhir buang air besar milik sendiri ada sebanyak 74 persen sementara sisanya menggunakan fasilitas lainnya. Sedangkan untuk ruta dengan KRT berjenis kelamin perempuan yang menggunakan jamban milik sendiri sekitar 62 persen dan sisanya menggunakan fasilitas bersama, MCK Umum, maupun tidak ada/tidak menggunakan fasilitas buang air besar.



\* Lainnya termasuk fasilitas bersama, MCK Umum, dan tidak ada/tidak menggunakan fasilitas buang air besar.

**Grafik 15. Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Jenis Kelamin KRT di Kota Surakarta, 2017 -2018**

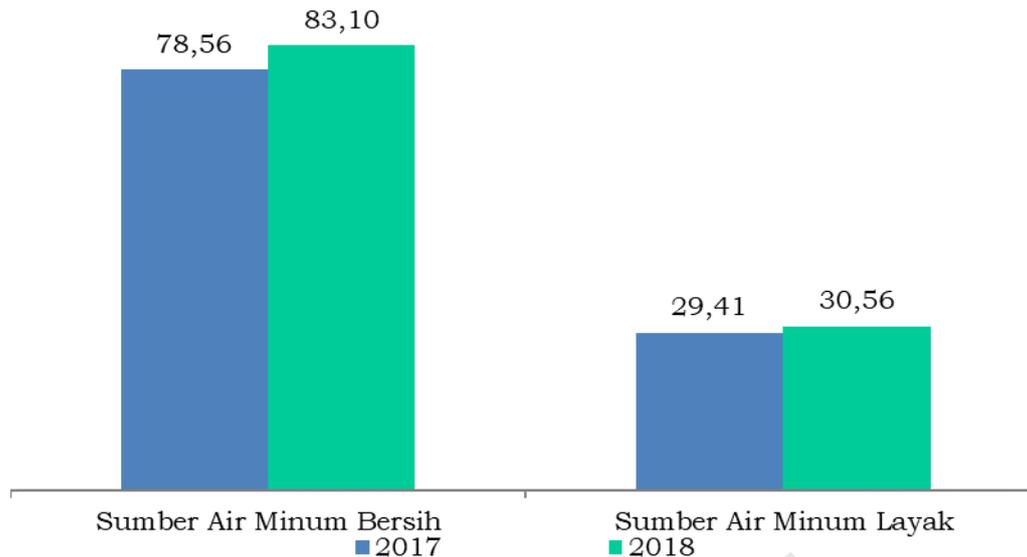


Baik rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar milik sendiri maupun lainnya, ternyata sebagian besar menggunakan jenis kloset leher angsa. Selain itu, pembuangan akhir tinja dari rumah tangga di Kota Surakarta sebagian besar di tangki septik/IPAL/SPAL/. Pembuangan menggunakan tangki ini dinilai paling higienis dibandingkan tempat pembuangan lainnya.

Salah satu kebutuhan yang tidak bisa lepas dari manusia adalah pemenuhan akan ketersediaan air minum. Secara fisiologis tubuh, manusia hanya mampu bertahan hidup antara 4 sampai dengan 7 hari tanpa minum. Air minum itu sendiri haruslah air minum dengan kualitas yang bersih sehingga mikroba dan organisme yang dapat mengganggu system metabolisme tidak banyak masuk ke dalam tubuh. Sanitasi yang baik salah satunya adalah dengan penyediaan sumber air minum bersih yang memadai.

Di tahun 2017 maupun 2018, belum semua rumah tangga di Kota Surakarta menggunakan sumber air minum bersih dan layak. Sumber Air Minum Bersih adalah sumber air minum yang berasal dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 m. Sumber Air Minum Layak adalah sumber air minum yang berasal dari leding, air hujan, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 m.

Tahun 2017 rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih berjumlah sekitar 63 persen sedangkan yang menggunakan sumber air minum layak sebesar 60 persen. Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih di tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 68 persen. Namun penggunaan sumber air minum yang layak lebih sedikit dibanding tahun 2017. Di tahun 2018, dari 100 rumah tangga yang ada di Kota Surakarta 41 diantaranya masih belum menggunakan sumber air minum yang layak.



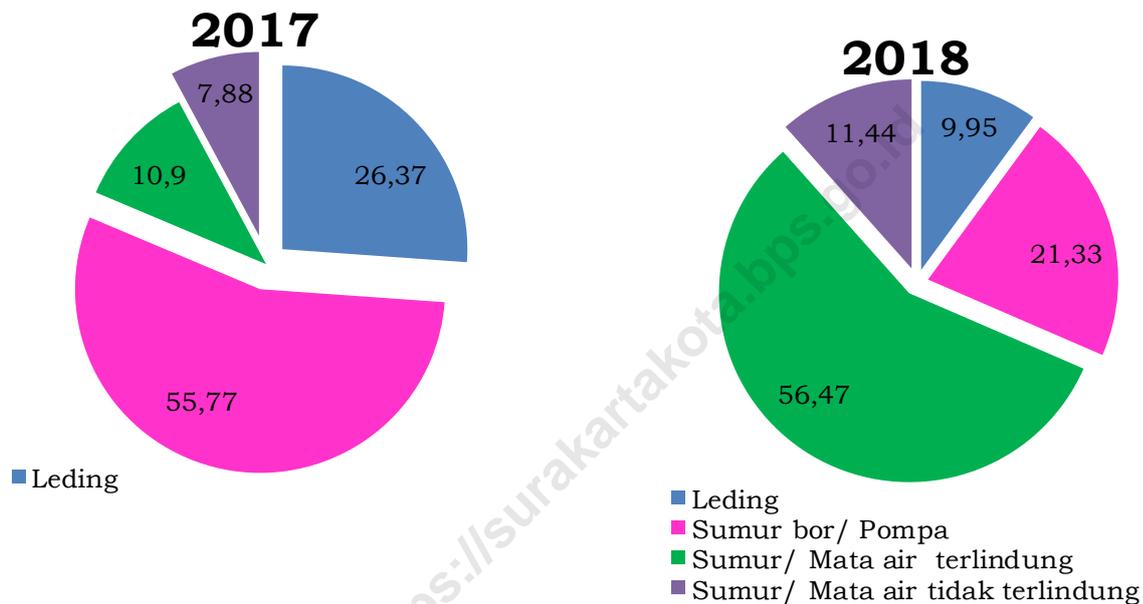
**Grafik 16. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih dan Sumber Air Minum Layak di Kota Surakarta, Tahun 2017 -2018**

Selain untuk minum, air juga digunakan untuk keperluan rumah tangga lainnya seperti memasak, mandi, mencuci, dan aktivitas lainnya. Kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga ini merupakan kebutuhan vital yang membutuhkan akses ketersediaan air yang layak dan mudah dijangkau. Akses air layak adalah sumber air minumannya terdiri leding, air hujan, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat  $\geq 10$  m] dan sumber air minum kemasan/air isi ulang dimana sumber air cuci/masak/mandi/dll menggunakan (sumur bor/pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat  $\geq 10$  m.

Jika dirinci menurut sumber air utama untuk memasak/mandi/cuci/dll, rumah tangga di Kota Surakarta pada tahun 2018 sebagian besar menggunakan air dari sumur bor atau pompa. Jumlah rumah tangga tersebut mencapai lebih dari separuh dari total rumah tangga di Kota Surakarta (61 persen). Sumber air untuk keperluan sehari-hari terbanyak kedua adalah leding yang tercatat mencapai 28 persen digunakan rumah tangga. Rumah tangga yang lain ada pula yang menggunakan sumur/mata air tak terlindung ataupun air kemasan sebagai sumber air untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.



Pada tahun 2017, jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum tidak jauh berbeda dengan tahun 2018. Paling banyak sumber mata air yang digunakan adalah dari sumur bor/pompa yang jumlahnya mencapai hampir 58 persen. Sumber lain yang juga banyak digunakan adalah leding yang jumlahnya sekitar 26 persen.



\*Lainnya termasuk air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan, dll.

**Grafik 17. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Memasak/ Mandi/Cuci/dll dan Jenis Kelamin KRT di Kota Surakarta, 2017 -2018**

Sebagai sumber penerangan, hampir semua rumah tangga di Kota Surakarta menggunakan sumber utama dari listrik PLN. Rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan berupa listrik non PLN jumlahnya tidak mencapai 1 persen dari total rumah tangga. Itupun nilai RSE-nya (*Relative Standart Error*) melebihi 50 persen. Nilai RSE yang cukup tinggi tersebut mengisyaratkan bahwa hasil estimasi tidak akurat. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena jumlah sampel yang tidak mewakili populasi untuk rumah tangga yang menggunakan listrik non PLN untuk itu tidak perlu diinterpretasikan.

Sekitar 259 ribu orang

usia 15 tahun  
ke atas bekerja  
di **Surakarta**

**BEKERJA**

Paling banyak  
penduduk bekerja  
di **Perdagangan**

Perdagangan

**Tenaga  
Kerja  
2018**

**PENGANGGURAN**

TPT sebesar  
**4,39 persen**

**ANGKATAN KERJA**

Separuh  
angkatan kerja  
berusia 45 tahun  
ke atas



**Sengaja dikosongkan**

<https://surakartakota.bps.go.id>

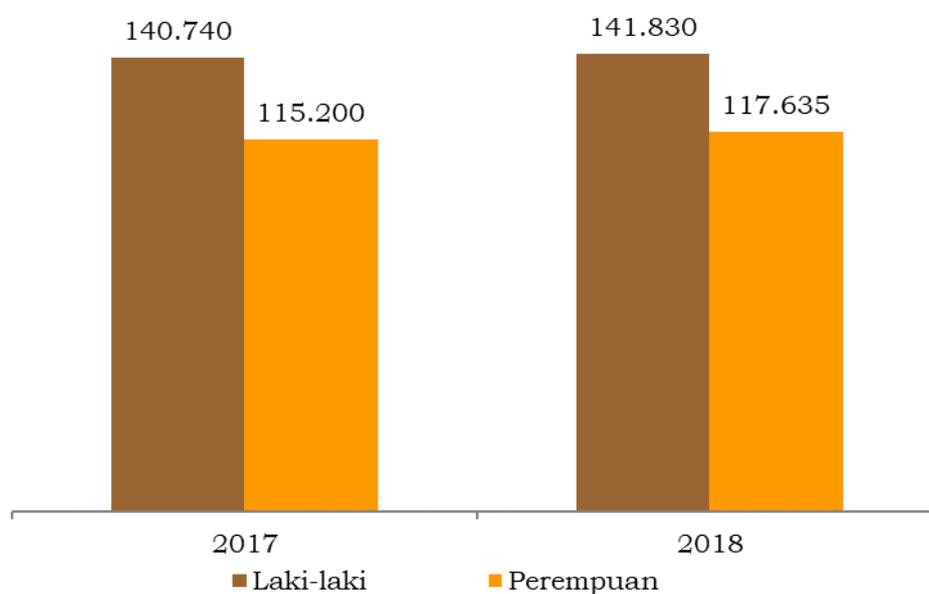


## BAB VII

# KETENAGAKERJAAN

Dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, manusia memerlukan mata pencaharian yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Untuk itu, hal mendasar yang dibutuhkan adalah dengan bekerja. Menurut BPS, definisi bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi. Penduduk yang telah tergolong sebagai penduduk usia kerja adalah yang berusia 15 tahun ke atas.

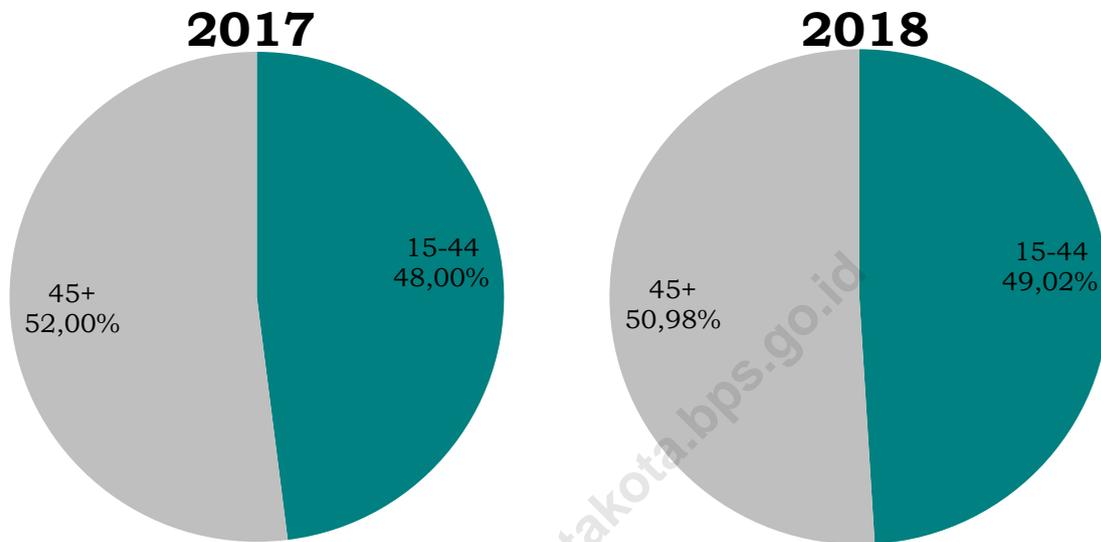
Berdasarkan hasil pengolahan Susenas, di tahun 2017 banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja di Kota Surakarta ada sebanyak 249 ribu orang. Jumlah ini bertambah sekitar 10 ribu orang di tahun 2018. Dari total pekerja tersebut, jumlah pekerja yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding pekerja perempuan. Dari 100 orang yang bekerja di Kota Surakarta, sekitar 58 orang adalah pekerja laki-laki.



**Grafik 18. Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu di Kota Surakarta, 2017 -2018**



Dari seluruh angkatan kerja yang tercatat di tahun 2018, separuh diantaranya berusia 45 tahun ke atas. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan keadaan tahun sebelumnya. Bahkan angkatan kerja dalam kelompok umur 60 tahun ke atas jumlahnya paling banyak diantaranya kelompok umur yang lain.



**Grafik 19. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Golongan Umur di Kota Surakarta, 2017 -2018**

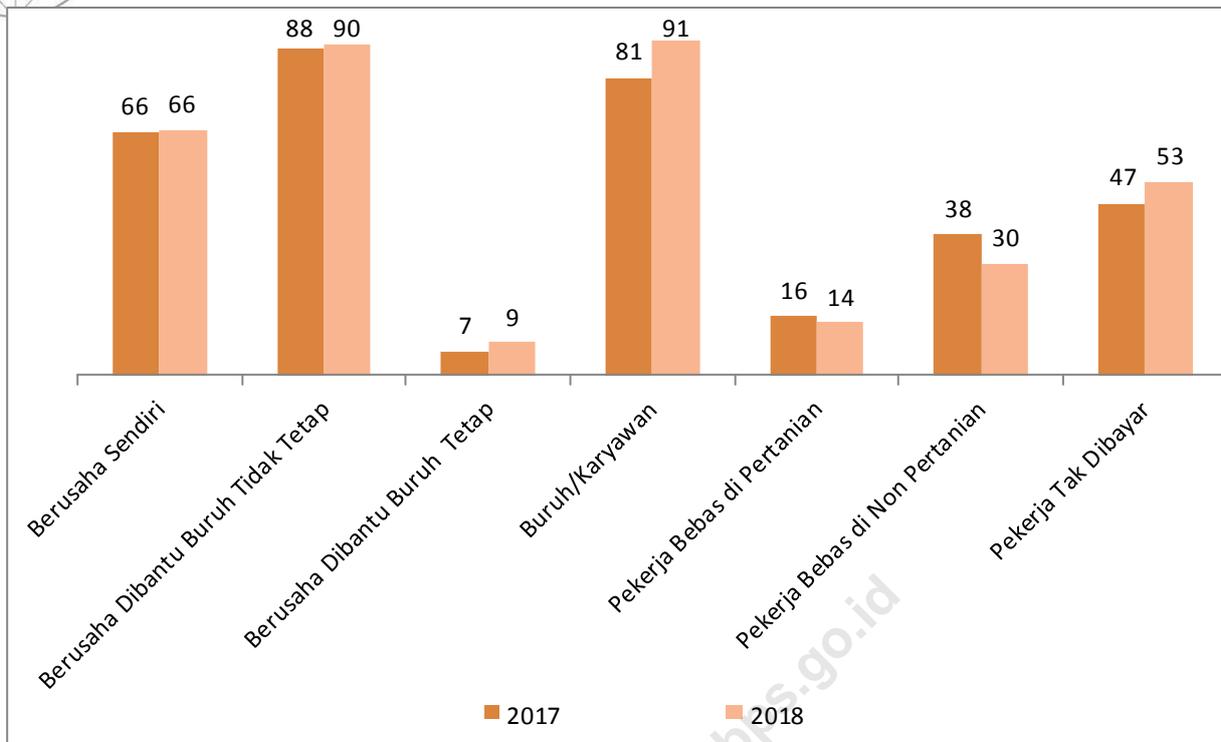
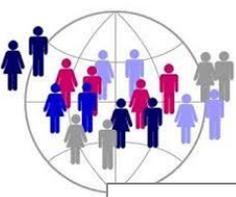
Angkatan kerja merupakan pasokan tenaga kerja diharapkan aktif secara ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah. Kualitas seorang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dapat dilihat salah satunya dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Di tahun 2018, 60 persen penduduk usia 15 tahun ke atas adalah tamatan SLTP ke bawah. Tamatan perguruan tinggi tidak mencapai 9 persen dari total penduduk yang termasuk angkatan kerja.

Secara keseluruhan penduduk yang bekerja, 35 persen diantaranya bekerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Hal ini dapat dikaitkan dengan banyaknya tenaga kerja di Kota Surakarta yang berlulusan SMP ke bawah yang bekerja di lapangan usaha tersebut. Ke depannya, diharapkan lapangan usaha ini tidak hanya berisikan tenaga kerja yang sudah tua atau berpendidikan SMP ke bawah namun juga penduduk usia muda dan berpendidikan lebih tinggi.



**Grafik 20. Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Surakarta, 2018**

Dari seluruh penduduk yang bekerja, 46 persen diantaranya berstatus sebagai pengusaha. Para pengusaha ini ada yang hanya berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dibantu buruh tetap. Selain itu, sekitar seperempat dari total penduduk bekerja berstatus sebagai buruh atau karyawan. Pekerja bebas baik di pertanian maupun di non pertanian di tahun 2018 sekitar 13 persen. Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar jumlahnya mencapai 15 persen. Dibanding tahun 2017, kecenderungan terjadi kenaikan jumlah pekerja selain yang berstatus pekerja bebas.



**Grafik 21. Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Surakarta (dalam Ribuan Orang), 2018**

Selain yang aktif bekerja, penduduk usia kerja juga ada yang termasuk dalam pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surakarta di tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,39 persen. Artinya, dari 100 orang yang termasuk angkatan kerja sekitar 4 orang diantaranya tergolong pengangguran terbuka. 4 orang tersebut berstatus sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, atau sebenarnya sudah diterima namun belum mulai bekerja.

Masalah pengangguran merupakan hal yang selalu muncul setiap tahun. Hal ini terjadi karena banyaknya penawaran pada pasar tenaga kerja sering kali tidak seimbang dengan kebutuhan tenaga kerja di pasar lapangan kerja. Selain itu, kompetensi atau keahlian yang ditawarkan oleh para tenaga kerja terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu.



Penganggur terbuka di Kota Surakarta di tahun 2018 tidak ada yang merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD) atau bahkan yang belum/tidak bersekolah. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar penduduk usia kerja tamatan SD atau yang belum/tidak bersekolah biasanya bekerja di lapangan usaha pertanian. Pertanian sendiri merupakan lapangan kerja yang paling banyak tersedia di Kota Surakarta sehingga menyerap lebih banyak tenaga kerja dibanding lapangan usaha lainnya. Penganggur terbuka paling banyak merupakan tamatan Sekolah Menengah Atas Kejuruan atau SMK/MAK. Jumlah ini mencapai 56 persen dari total penganggur terbuka di Kota Surakarta pada tahun tersebut.

Dari keseluruhan pengangguran terbuka di Kota Surakarta, 87 persen diantaranya berstatus sedang mencari pekerjaan. Sementara 7 persen lainnya sedang mempersiapkan usaha dan sisanya sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Ternyata tidak terdapat penganggur terbuka yang merasa tidak mampu mendapatkan pekerjaan sehingga tidak bekerja maupun orang yang hanya berdiam diri tanpa melakukan usaha. Termasuk pula didalamnya adalah para tamatan SMK. Lulusan-lulusan SMK ini yang masuk dalam kategori penganggur terbuka juga sedang melakukan usaha untuk mendapat pekerjaan/usaha atau bahkan sebenarnya sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja. Dari data Dinas Ketenagakerjaan Kota Surakarta, sebanyak 5.015 orang lulusan SMK telah terdaftar secara resmi sebagai pencari kerja sementara 1.628 lulusan SMK telah ditempatkan pada lapangan kerja resmi dan tercatat pada tahun 2018.



<https://surabartakota.bps.go.id>

**Sengaja dikosongkan**

# PENGELUARAN KONSUMSI

Pengeluaran untuk makanan sebesar 41,69 persen di Tahun 2018

Pengeluaran untuk Non makanan sebesar 58,31 persen di Tahun 2018

Di Tahun 2017 rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari adalah sebesar 1.836,51 kilo kalori (Kkal) dan naik menjadi 1.880,78 kkal di tahun 2018

Konsumsi protein per kapita per hari di Kota Surakarta 57,20 gram

**Sengaja dikosongkan**

<https://surakartakota.bps.go.id>





## **BAB VIII**

# **PENGELUARAN DAN KONSUMSI PENDUDUK**

Tujuan kedua dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan yang menunjukkan keseriusan dan perhatian dunia global terhadap masalah gizi. Di Indonesia sendiri, tujuan ini telah bersinergi dengan Nawacita pemerintah dalam peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Baiknya kualitas sebuah individu tidak lepas dari peranan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Konsumsi makanan dan minuman yang bergizi mempengaruhi kualitas tubuh manusia itu sendiri. Dari tubuh yang sehat dan prima, tumbuhlah sumberdaya manusia yang mampu mengisi dan berkontribusi terhadap kemajuan suatu wilayah.

Konsumsi makanan dan minuman yang berkualitas mencakup asupan karbohidrat, protein, lemak, dan kalori. Dengan melakukan pemenuhan zat gizi yang penting bagi tubuh dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan suatu individu. Sejalan dengan hal tersebut, pengeluaran rumah tangga dalam kaitannya memilih bahan pangan dan mengkonsumsinya menjadi tolak ukur daya beli rumah tangga tersebut. Semakin banyak asupan bahan pangan yang mendekati nilai kecukupan gizi, dianggap semakin sejahtera rumah tangga tersebut.

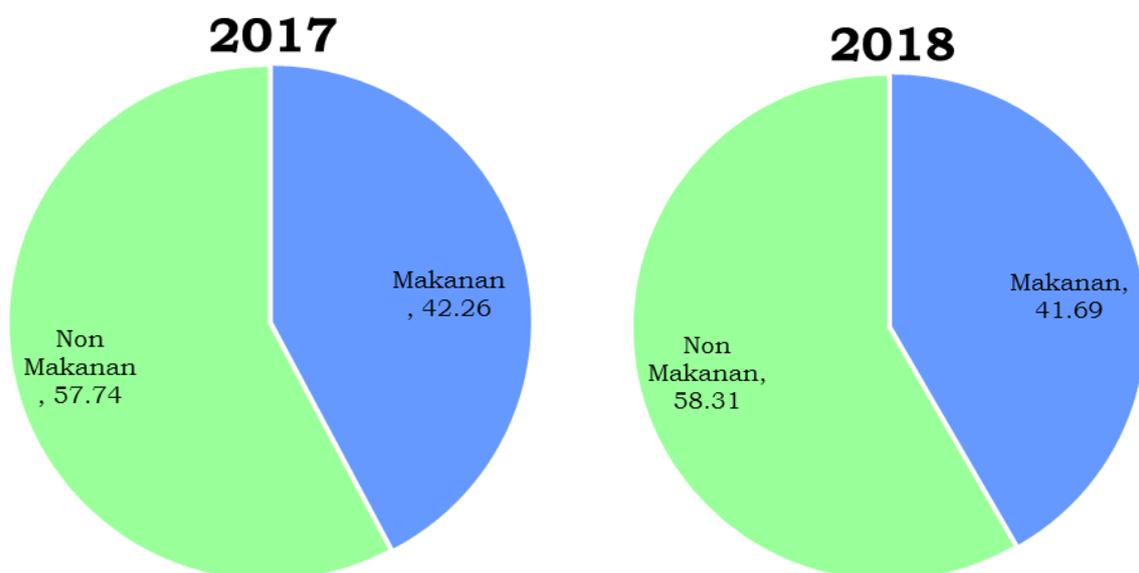
Pengukuran kecukupan gizi melalui Susenas masih terbatas pada besarnya konsumsi kalori dan protein. Besarnya konsumsi kalori dan protein dihitung dengan mengalikan kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan nilai kandungan kalori dan protein setiap jenis makanan berdasarkan daftar konversi zat gizi. Saat ini daftar konversi zat gizi berpedoman pada hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X, 20-21 November 2012 di Jakarta, dalam buku karangan Djoko Kartono,



Hardinsyah, Abas Basuni Jahari, dan Moesijanti Soekarti dengan Judul “Penyempurnaan Kecukupan Gizi untuk Orang Indonesia” LIPI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia adalah 2.150 kkal dan 57 gram protein. Di tahun 2017, rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari masyarakat di Kota Surakarta adalah sebesar 1.836,51 kilo kalori (kkal). Jumlah ini berada sedikit dibawah angka kecukupan gizi nasional. Pada tahun 2018, kecukupan konsumsi kalori masyarakat Kota Surakarta mengalami kenaikan sebanyak sekitar 44,27 kkal dibanding tahun sebelumnya. Untuk konsumsi protein per kapita sehari masyarakat Kota Surakarta hampir sama secara nasional di tahun 2017. Pada tahun 2018 terdapat sedikit kenaikan untuk konsumsi protein menjadi sekitar 67 gram perkapita sehari.

Untuk pengeluaran per kapita per bulan masyarakat Kota Surakarta pada tahun 2017 lebih sedikit untuk komoditi makanan namun perbedaannya hanya sekitar 2 persen saja dengan pengeluaran komoditi non makanan. Di tahun 2018, kondisi ini sedikit berubah dimana pengeluaran masyarakat Kota Surakarta lebih banyak mengeluarkan dana untuk kebutuhan komoditi non makanan.



**Grafik 22. Persentase Pengeluaran Per Kapita Per Bulan menurut Jenis Pengeluaran di Kota Surakarta , 2017-2018**

# LAIN-LAIN



Sekitar 78,41 persen masyarakat Kota Surakarta yang berusia 5 tahun ke atas menggunakan telepon seluler (HP)/ nirkabel atau perangkat keras pengolah data seperti komputer di tahun 2018

Di Tahun 2018, sekitar 12,74 persen rumah tangga di Kota Surakarta menerima Jaminan sosial melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)



Di tahun 2018, kepemilikan aset rumah tangga di Kota Surakarta lebih banyak dibandingkan tahun 2017



**Sengaja dikosongkan**

<https://surakartakota.bps.go.id>



## BAB IX LAIN-LAIN

Di era industri 4.0 saat ini, manusia dituntut semakin mengikuti perkembangan teknologi demi kelangsungan dan kelancaran kehidupan bermasyarakat. Informasi berkembang sangat pesat melalui teknologi informasi yang didukung oleh perangkat keras dan lunak yang semakin menunjukkan kemajuan setiap waktunya. Penggunaan perangkat teknologi yang menyediakan keleluasaan mengakses informasi juga dapat menjadi suatu ukuran kesejahteraan rumah tangga di suatu wilayah. Rumah tangga yang memiliki akses lebih banyak dalam pemanfaatan TI seperti misalnya penggunaan internet maupun *smartphone* dapat dikatakan lebih sejahtera dalam hal pemenuhan kebutuhan akan informasi.

Sebagian besar atau sekitar 78 persen masyarakat Kota Surakarta yang berusia 5 tahun ke atas menggunakan telepon seluler (HP)/nirkabel atau perangkat keras pengolah data seperti komputer di tahun 2018. Di tahun 2017, jumlah pengguna telepon seluler (HP)/nirkabel sebanyak 74 persen. Pengguna computer pada tahun ini dibedakan dari pengguna HP dan tercatat sekitar 84 persen. Separuh lebih anggota rumah tangga yang berusia 5 tahun ke atas memiliki telepon seluler (HP)/nirkabel di tahun 2017 dan 2018. Jumlah ini menunjukkan alat komunikasi seluler/nirkabel telah menjadi kebutuhan banyak orang di Kota Surakarta. Namun dalam hal penggunaan internet, baru sekitar sepertiga masyarakat Kota Surakarta yang mengaksesnya (termasuk untuk *facebook, twitter, BBM, maupun whatsapp*). Ini menunjukkan masih ada wilayah yang terbatas dalam akses internet yang dapat disebabkan karena ketersediaan layanan internet di wilayah tersebut atau karena kurangnya biaya dalam pemenuhan kebutuhan internet tersebut.



Selain mempertimbangkan kemajuan teknologi, kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari banyaknya program perlindungan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah. Semakin sedikit pemerintah mengeluarkan anggaran untuk program-program tersebut, maka diasumsikan masyarakat wilayah tersebut semakin sejahtera. Program perlindungan sosial pada umumnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari yang tadinya kurang sejahtera menjadi semakin sejahtera.



**Grafik 23. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima di Kota Surakarta , 2017-2018**

Sekitar 16 persen rumah tangga di Kota Surakarta menerima program raskin/rastra. Program ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Selain itu untuk program juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Jika diterima secara utuh, alokasi 15 kg beras per bulan akan dapat mengurangi kemiskinan sekitar 1,22 persen atau sekitar 2,69 juta jiwa (P4S, Bappenas, 2013).

Program Indonesia Pintar (PIP) dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap



mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar). Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Terjadi penurunan yang cukup signifikan terkait penerima PIP ini di Kota Surakarta antara tahun 2017 ke 2018 dimana tadinya sekitar 83 persen menjadi 16 persen saja.

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterima oleh rumah tangga di Kota Surakarta pada tahun 2017 sebanyak 19 persen dari total rumah tangga. Sementara di tahun 2018 menurun menjadi sekitar 12 persen.

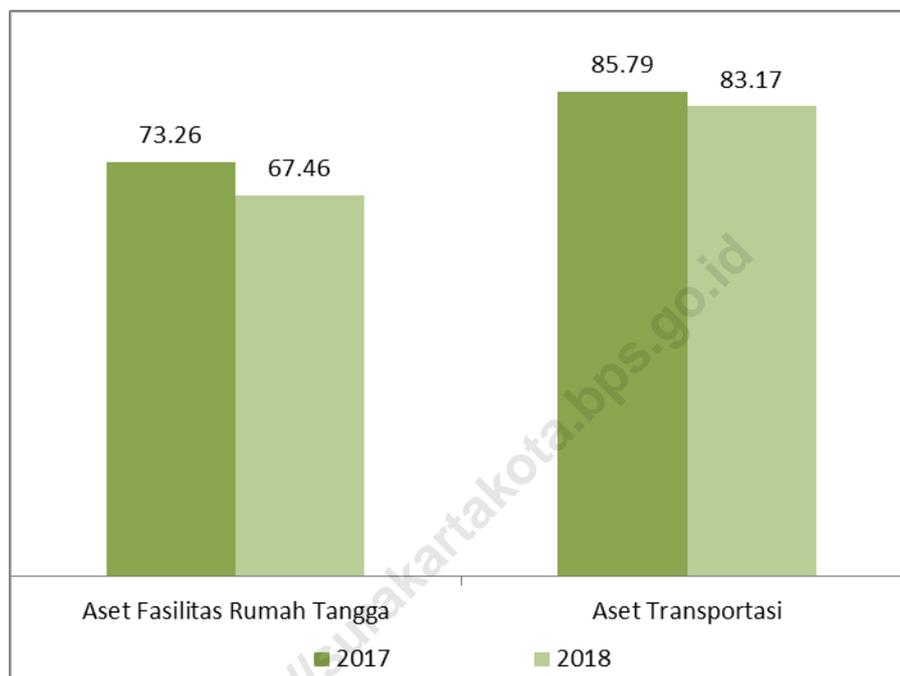
Program perlindungan sosial lainnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Rumah tangga penerima manfaat ini di Kota Surakarta berjumlah sekitar 8 persen.

Di tahun 2017, dari 100 rumah tangga di Kota Surakarta ada sekitar 8 rumah tangga yang menerima jaminan pension atau hari tua. Jumlah ini menurun di tahun 2018 menjadi sekitar 7 rumah tangga saja. Sementara itu, peneriman asuransi atau pesangon PHK di Kota Surakarta ada sekitar 8 persen dari total rumah tangga.

Kepemilikan suatu aset di rumah tangga menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Aset itu sendiri dalam Susenas dibedakan menjadi dua asset utama yaitu Aset Fasilitas Rumah Tangga dan Aset Transportasi. Aset fasilitas rumah tangga terdiri dari lemari es/kulkas, *Air Conditioner (AC)*, pemanas air, televisi layar datar, tabung gas, dan atau telepon rumah. Sementara aset transportasi terdiri dari sepeda motor, perahu, perahu motor, dan atau mobil.



Di tahun 2017, rumah tangga yang memiliki aset fasilitas rumah tangga mencapai 73 persen, angka ini sedikit menurun di tahun 2018 menjadi sekitar 67 persen. Sementara itu, rumah tangga yang memiliki aset transportasi sebanyak 86 persen pada tahun 2017 dan 83 persen di tahun 2018. Angka ini menunjukkan ketersediaan alat transportasi bagi rumah tangga di Kota Surakarta cukup memadai.



**Grafik 24. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Aset di Kota Surakarta , 2017-2018**



<https://surakartakota.bps.go.id>

## **LAMPIRAN**



**Tabel Lampiran 1**  
**Proyeksi Penduduk Kota Surakarta menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2018**

<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki + Perempuan</b>	<b>Rasio Jenis Kelamin</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laweyan	43,331	45,972	45,972	94.25
Serengan	21,866	23,434	23,434	93.31
Pasar Kliwon	38,025	39,044	39,044	97.39
Jebres	69,223	74,035	74,035	93.50
Banjarsari	79,531	83,709	83,709	95.01
Bener	43,331	45,972	45,972	94.25
<b>Total</b>	<b>251.976</b>	<b>266.194</b>	<b>518.170</b>	<b>94.66</b>

Sumber : BPS, Penduduk Kota Surakarta Hasil Proyeksi 2010-2020



**Tabel Lampiran 2**  
**Proyeksi Penduduk Kota Surakarta menurut Kelompok Umur**  
**dan Jenis Kelamin, 2018**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki + Perempuan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	17,693	16,881	34,574
5-9	18,251	17,346	35,597
10-14	17,592	16,999	34,591
15-19	22,334	24,467	46,801
20-24	27,043	27,017	54,060
25-29	20,953	19,774	40,727
30-34	18,364	18,602	36,966
35-39	17,710	19,051	36,761
40-44	17,594	18,925	36,519
45-49	16,702	19,192	35,894
50-54	16,384	18,810	35,194
55-59	14,806	16,492	31,298
60-64	10,600	11,111	21,711
65+	15,746	21,448	37,194
<b>Total</b>	<b>251.772</b>	<b>266.115</b>	<b>517.887</b>

Sumber : BPS, Penduduk Kota Surakarta Hasil Proyeksi 2010-2020



## DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Surakarta. 2016. *Penduduk Kota Surakarta Hasil Proyeksi Tahun 2010-2020*. Kota Surakarta.
- BPS Kota Surakarta. 2017. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surakarta 2017*. Kota Surakarta.
- BPS Kota Surakarta. 2018. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surakarta 2018*. Kota Surakarta.
- BPS Kota Surakarta. 2018. *Kota Surakarta Dalam Angka 2018*. Kota Surakarta.
- BPS Kota Surakarta. 2019. *Kota Surakarta Dalam Angka 2019*. Kota Surakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi*. Jakarta.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2017. *Keadaan Angkatan Kerja Jawa Tengah Agustus 2017*. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2018. *Keadaan Angkatan Kerja Jawa Tengah Agustus 2018*. Semarang.
- [raskin.bangda.kemendagri.go.id](http://raskin.bangda.kemendagri.go.id) yang diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.
- [indonesiapintar.kemdikbud.go.id](http://indonesiapintar.kemdikbud.go.id) yang diakses pada tanggal 13 Agustus 2019.
- [wikipedia.org](http://wikipedia.org) yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2019.

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://surakarta.bps.go.id>



*Badan Pusat Statistik  
Kota Surakarta*

Jl. P Lumban Tobing no. 6 Pasar Legi Setabelan Banjarsari Surakarta 57133